

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nonlaba, dituntut untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan termasuk dalam kategori entitas nonlaba, karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan sosial, pendidikan, dan dakwah. Meskipun demikian, aktivitas keuangan di pondok pesantren tetap kompleks, mencakup penerimaan dana dari masyarakat, donatur, maupun pemerintah, serta pengeluaran untuk kegiatan operasional, pendidikan santri, gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, hingga program sosial-keagamaan.

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam pembinaan keagamaan, pembentukan karakter, serta pengembangan sumber daya manusia. Sebagai lembaga yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan, pondok pesantren termasuk dalam kategori entitas nirlaba yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun demikian, dalam menjalankan operasionalnya pondok pesantren tetap melakukan berbagai aktivitas keuangan yang memerlukan pengelolaan secara terstruktur dan sistematis.

Pengelolaan keuangan pada yayasan pondok pesantren mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, penatausahaan transaksi, hingga penyusunan laporan keuangan pada akhir periode. Sumber dana yang dikelola umumnya berasal dari iuran santri, sumbangan masyarakat, donatur, serta bantuan pemerintah. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan pendidikan, pembayaran honor tenaga pendidik dan karyawan, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta kebutuhan operasional lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan yang baik sangat diperlukan agar penggunaan dana dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan tujuan lembaga.

Penelitian yang dilakukan oleh Salamah dan Nasrullah (2023) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disusun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan ISAK 35. Pondok pesantren tersebut masih menyajikan laporan dalam bentuk pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas tanpa menyusun seluruh komponen laporan keuangan sebagaimana diatur dalam standar. Hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa penerapan ISAK 35 pada lembaga pendidikan berbasis pesantren masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek teknis penyusunan laporan keuangan.

Namun, fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani belum sepenuhnya menerapkan pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan ISAK 335 secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus yayasan, pengelolaan keuangan memang telah dilakukan melalui proses pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana. Akan tetapi, dalam praktiknya proses tersebut masih berjalan secara sederhana dan belum sepenuhnya tersusun secara sistematis sesuai dengan standar yang berlaku.

Jika ditinjau dari aspek perencanaan, penyusunan anggaran belum dilakukan secara terstruktur dan belum terdokumentasi secara rinci untuk setiap kegiatan operasional. Dari sisi pelaksanaan, penggunaan dana masih menyesuaikan kebutuhan yang bersifat insidental sehingga belum sepenuhnya didasarkan pada perencanaan yang matang. Pada tahap penatausahaan, pencatatan transaksi keuangan telah dilakukan, namun belum disertai dengan sistem administrasi yang lengkap dan terdokumentasi secara berkala. Sementara itu, dalam aspek pelaporan, laporan keuangan belum disusun secara periodik dan belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan ISAK 335 sebagai pedoman penyajian laporan keuangan entitas nirlaba.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman pengurus yayasan mengenai standar ISAK 335 serta terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki latar belakang akuntansi. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan keuangan belum berjalan secara terstruktur dari tahap perencanaan hingga pelaporan. Oleh karena

itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana pengelolaan keuangan yang diterapkan selama ini jika ditinjau berdasarkan ketentuan ISAK 335.

Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al-Bantani sebagai lembaga pendidikan Islam yang berperan dalam kegiatan sosial dan keagamaan juga menghadapi tantangan serupa. Sebagai lembaga yang bergantung pada dukungan masyarakat dan donatur, pondok pesantren ini dituntut untuk mengelola keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, penerapan standar akuntansi ISAK 335 diharapkan dapat membantu lembaga dalam menyusun laporan keuangan yang jujur, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas tata kelola keuangan yayasan.

Setiap organisasi, baik yang berorientasi laba maupun nonlaba, dituntut untuk mengelola keuangannya secara transparan dan akuntabel. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan keagamaan termasuk dalam kategori entitas nonlaba, karena tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan memberikan pelayanan sosial, pendidikan, dan dakwah. Meskipun demikian, aktivitas keuangan di pondok pesantren tetap kompleks, mencakup penerimaan dana dari masyarakat, donatur, maupun pemerintah, serta pengeluaran untuk kegiatan operasional, pendidikan santri, gaji tenaga pendidik, pemeliharaan fasilitas, hingga program sosial-keagamaan.

Dengan adanya penerapan ISAK 335, pondok pesantren maupun yayasan memiliki landasan yang jelas dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Hal ini bukan hanya sebatas pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan dana. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan ISAK 335 akan mempermudah pihak internal dalam mengevaluasi kinerja keuangan, serta memberikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi pihak eksternal seperti donatur, pemerintah, maupun masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada lembaga pendidikan berbasis keagamaan, khususnya pondok pesantren, yang dalam praktiknya memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi bisnis. Pondok pesantren memerlukan pedoman standar akuntansi yang jelas agar laporan keuangan yang disusun dapat dipahami, relevan,

dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, ISAK 335 menjadi acuan penting karena mengatur penyajian laporan keuangan yang mencakup laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan standar ini bertujuan agar laporan keuangan pondok pesantren dapat disusun secara sistematis dan konsisten sehingga memudahkan dalam proses evaluasi maupun pertanggungjawaban kepada pihak internal dan eksternal.

Selain itu, ISAK 335 juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan. Akuntabilitas dalam penerapan ISAK 335 tercermin dari kewajiban pengurus lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan sumber daya secara jujur dan tepat sasaran, sesuai dengan tujuan lembaga. Sementara itu, transparansi diwujudkan dengan penyampaian laporan keuangan yang terbuka, mudah diakses, serta dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan. Seperti yang disampaikan oleh Safitri dan Narasti (2023), penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam penyajian laporan keuangan lembaga berbasis ISAK 335 dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperkuat tata kelola keuangan, dan memastikan bahwa setiap dana yang diterima telah digunakan secara efektif dan efisien.

Namun, pada kenyataannya, tidak semua pondok pesantren mampu menerapkan ISAK 335 secara optimal. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang memahami standar akuntansi, belum tersedianya sistem administrasi yang memadai, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kondisi ini dapat menghambat terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat maupun donatur terhadap lembaga.

Selain itu, penerapan ISAK 335 juga membantu lembaga nirlaba seperti pondok pesantren dalam menyesuaikan sistem akuntansi mereka dengan standar yang berlaku umum. Hal ini penting mengingat lembaga nirlaba seringkali mengelola dana dari berbagai sumber, baik dari donatur, masyarakat, maupun pemerintah, sehingga diperlukan mekanisme pelaporan yang jelas, transparan, dan akuntabel. Dengan adanya standar ini, laporan keuangan tidak hanya menjadi alat

administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai sarana komunikasi yang efektif antara lembaga.

Melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, kepercayaan masyarakat terhadap yayasan akan semakin meningkat. Selain itu, tata kelola keuangan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sehingga yayasan mampu menjaga kredibilitasnya di hadapan pihak internal maupun eksternal. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Pengelolaan Keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani Berdasarkan ISAK 335 ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditetapkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi perencanaan berdasarkan ISAK 335?
2. Bagaimana pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi pelaksanaan berdasarkan ISAK 335?
3. Bagaimana pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi penatausahaan berdasarkan ISAK 335?
4. Bagaimana pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi pelaporan berdasarkan ISAK 335?
5. Apa kendala yang di hadapi dalam pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani berdasarkan ISAK 335?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada analisis pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani berdasarkan ISAK 35 yang mencakup empat aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. Penelitian tidak membahas aspek lain di luar keempat tahapan tersebut, seperti sistem pengendalian internal secara mendalam atau audit keuangan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana penerapan keempat

tahapan pengelolaan keuangan tersebut jika ditinjau berdasarkan ketentuan ISAK 35.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi perencanaan berdasarkan ISAK 335.
2. Untuk mengetahui Pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi pelaksanaan berdasarkan ISAK 335.
3. Untuk mengetahui Pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi penatausahaan berdasarkan ISAK 335
4. Untuk mengetahui Pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani dari segi pelaporan berdasarkan ISAK 335
5. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan keuangan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Al Bantani berdasarkan ISAK 335.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi pengetahuan mengenai penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan entitas nirlaba berdasarkan ISAK 335.
 - b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait standar akuntansi untuk organisasi nirlaba atau lembaga keagamaan.
2. Secara Praktis
 - a. Memberikan panduan bagi manajemen organisasi nirlaba dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan akuntabilitas dan transparansi sesuai ISAK 335.

- b. Membantu organisasi dalam mengidentifikasi kendala yang menghambat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat merumuskan strategi perbaikan.